



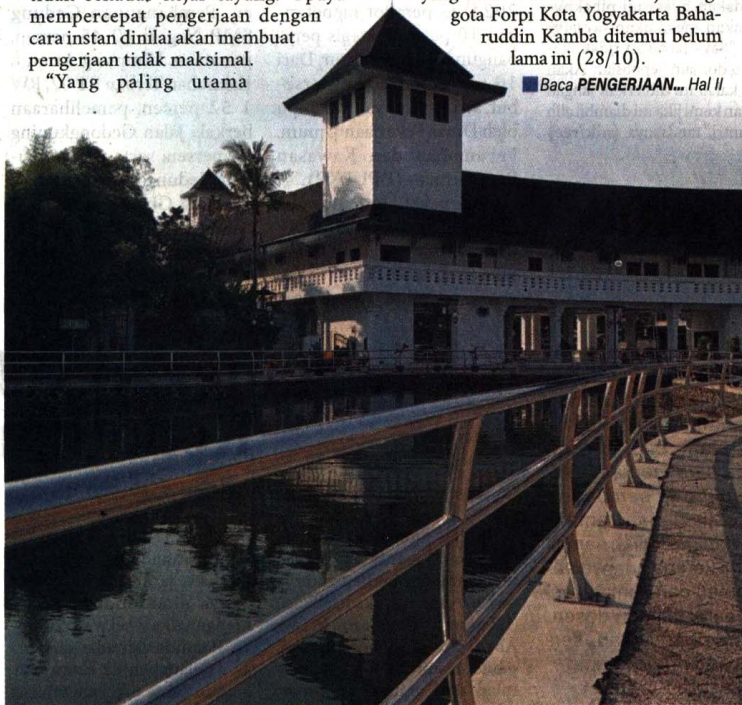
Pengerjaan Proyek Jangan Kejar Tayang

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* — Forum Pemantauan Independen (Forpi) Kota Yogyakarta meminta pengerjaan proyek Pemkot Yogyakarta di akhir tahun ini tidak sekadar kejar tayang. Upaya mempercepat pengerjaan dengan cara instan dinilai akan membuat pengerjaan tidak maksimal.

“Yang paling utama

tidak kejar tayang. Tidak asal-asalan dalam pengerjaannya karena mengejar waktu (akhir tahun) harus rampung. Tetapi proyek tersebut tetap diselesaikan dalam koridor yang benar-benar realistis,” ujar Anggota Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba ditemui belum lama ini (28/10).

■ Baca **PENGERJAAN...** Hal II



ISTIMENIA/JOGLO JOGJA
EMBUNG: Kondisi Embung Giwangan di pagi hari, masih sepi pengunjung. Pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan tahap II baru mencapai 45 persen.

Pengerjaan Proyek Jangan Kejar Tayang

sambungan dari hal Joglo Jogja

Dia mengatakan, pada 2024 ini Pemkot menetapkan 10 paket strategis pembangunan infrastruktur. Dari 10 paket pengerjaan tersebut, ada 5 paket yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Lima paket strategis yang ditangani oleh Dinas PUPKP ini meliputi pembangunan saluran air hujan di RW 13 Giwangan, Umbulharjo dengan

progres pengerjaan 72 persen. Pembangunan Gedung SMP Negeri 10 45 persen, penataan kampung kumuh Kalurahan Terban RT 02, RW 1 52 persen, pemeliharaan berkala Jalan Gedongkuning 98 persen, serta pembangunan Gedung Taman Budaya Embung Giwangan tahap II baru mencapai 45 persen.

Memasuki November nanti, kata Kamba, kelima proyek tersebut masih dalam proses

pembangunan dan diharapkan bisa rampung sebelum pergantian tahun. Sementara itu, hingga triwulan III ini, realisasi fisik proyek DPUPKP belum mencapai 60 persen.

"Kami meminta agar 5 proyek strategis tersebut, yang masih di bawah 50 persen, tidak dilakukan dengan instan dan terburu-buru alias kejar tayang," tegas dia.

Pihaknya menganggap, adanya prioritas khusus ter-

hadap proyek tersebut boleh-boleh saja, tapi tetap dalam koridor yang realistis. Sehingga, ujar Kamba, tidak perlu beralasan kejar tayang yang dimungkinkan adanya suap-menyuap antara pelaksana atau kontraktor dengan dinas terkait.

"Padahal, pengerjaan belum sepenuhnya rampung tetapi karena ada suap-menyuap, maka pengerjaan dianggap rampung. Hal ini tidak boleh terjadi," tandasnya. (nik/ree)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005